



## Performance of Public Relations Employees at the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) Representative of Bengkulu Province

### Kinerja Pegawai Bagian Humas Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu

Harius Eko Saputra<sup>1)</sup>; Evi Lorita<sup>2)</sup>; Resi Dwi Aprianti<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Public Administration Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [hariussaputra@unived.ac.id](mailto:hariussaputra@unived.ac.id) ;<sup>2)</sup> [evilorita@unived.ac.id](mailto:evilorita@unived.ac.id) ;<sup>3)</sup> [residwiaprianti@gmail.com](mailto:residwiaprianti@gmail.com)

#### How to Cite :

Saputra, E. H. Lorita, E., Aprianti, D. R. (2023). Performance of Public Relations Employees at the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) Representative of Bengkulu Province. SENGKUNI Journal: *Social Sciences and Humanities*, 4 (1). DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.1.143-152>

#### ARTICLE HISTORY

Received [02 June 2023]

Revised [20 June 2023]

Accepted [31 July 2023]

#### KEYWORDS

Performance, Work Results, Public Relations, Audit Board

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Bagian Humas Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuat perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli, serta jurnal ilmiah. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden atau pihak terkait atau melalui kuisioner berupa kumpulan pertanyaan tentang Kinerja Pegawai Bagian Humas Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini, hasil penelitian mendeskripsikan kinerja (hasil kerja) bagian Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan tugas dan fungsi bagian Humas yang terdiri dari: mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan kepala perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan fasilitator komunikasi kepada publik melalui media website. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa: (1) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mengelola perpustakaan sesuai kaidah pengelolaan perpustakaan yang berlaku, sehingga perpustakaan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi para pembaca. (2) Dalam bidang kesekretariatan Bagian Humas menyiapkan beberapa perlengkapan seperti komputer dan lainnya guna mengadministrasikan surat-surat yang masuk dan keluar di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. (3) Bagian Humas bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan aktivitas protokolier baik di dalam lingkungan maupun di luar kantor perwakilan sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Humas telah menyiapkan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dibutuhkan Kepala Perwakilan sesuai dengan standar operasional prosedur. (5) SIMAK BPK RI merupakan suatu aplikasi internet berbasis web. Dalam hal ini, Humas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan penugasan sesuai dengan standar operasional prosedur kerja. (6) Data Entitas Pemeriksaan (DEP) adalah kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dozir Induk Wilayah (DIW). (7) Dengan adanya website yang menunjang komunikasi kepada masyarakat maka kegiatan kehumasan jadi lebih fleksibel, lebih efektif bahkan lebih efisien jika dibandingkan dilakukan di dunia nyata.

#### ABSTRACT

This study aims to determine the Performance of Public Relations Employees at the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) Representative of Bengkulu Province. This study uses a normative legal approach in the form of laws and regulations, official records or treatises in legislators, books, expert opinions, and scientific journals. Sources of research data were obtained through direct interviews with respondents or related parties or through questionnaires in the form of a collection of questions about the Performance of Public Relations Employees at the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) Representative of Bengkulu Province. In this study, the research results describe the performance (work results) of the Public Relations section of the Supreme Audit Agency (BPK) Bengkulu Province Representative based on the duties and functions of the Public Relations section which consists of: managing the library, secretariat, protocol, preparing information needed by the head of the representative, as well as updating data on SIMAK

*application in measuring work unit KPI and DEP storage in the scope of BPK Representative Office of Bengkulu Province, and communication facilitator to the public through website media. The results of the study describe that: (1) BPK Representative of Bengkulu Province has managed the library according to the applicable library management principles, so that the library can provide optimal benefits for readers. (2) In the secretarial field, the Public Relations Section prepares several equipment such as computers and others to administer incoming and outgoing letters at the BPK Representative Office of Bengkulu Province. (3) The Public Relations Division cooperates with related parties in the framework of implementing protocol activities both inside and outside the representative office in accordance with applicable regulations. (4) Public Relations has prepared information relating to the inspection required by the Head of Representative in accordance with standard operating procedures. (5) SIMAK BPK RI is a web-based internet application. In this case, the BPK Representative Office of Bengkulu Province has carried out the assignment in accordance with standard operating procedures. (6) Examination Entity Data (DEP) is a collection of data related to entities that are objects of inspection, previously known as Regional Master Dozir (DIW). (7) With a website that supports communication with the public, public relations activities become more flexible, more effective and even more efficient when compared to those carried out in the real world.*

## PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No. 30 tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan dilingkungan pemerintahan, humas dalam instansi pemerintah memiliki visi dan misi yang jelas, yakni menciptakan sumberdaya manusia humas pemerintahan yang profesional, membentuk sistem manajemen humas, menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi kelancaran tugas kehumasan.

Setiap pegawai dalam organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya (Gibson, et all, 1995:364). Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2006:34). kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian Robbins (2008) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Humas BPK RI berfungsi sebagai organisasi yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik atau pemangku kepentingan dan jembatan informasi kebijakan pemerintahan kepada masyarakat luas serta menampung masukan dan aspirasi rakyat. Serta bertujuan menyebarkan informasi agar masyarakat sadar, sengaja, terencana dan terus menerus mengerti dan mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh BPK RI. Peranan Humas BPK RI adalah untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut dimata publiknya.

Akibatnya jika tidak ada suatu program kehumasan yakni, semua usaha akan terpecah belah karena khalayak yang dituju terlalu luas atau umum (tidak spesifik), pesan yang hendak dikirimkan tidak diterima, tidak dipahami dan tidak dimengerti dengan baik oleh khalayak sebab pesan yang disampaikan tidak bersesuaian dengan karakteristik khalayak itu sendiri,keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan tidak akan bersesuaian dengan jadwal yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama yang kemudian menjadikan materi, penggunaan jam kerja serta peralatan tidakekonomis, tujuan yang diinginkan sulit digapai atau luput dari jangkauan, serta humas eksternal (instansi lain misalnya) dan humas internal (manajemen) tidak akan puas akan hasil yang didapatkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu berusaha menginformasikan aktivitas pemerintahannya kepada masyarakat serta bertindak sebagai pemberi data dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, membangun hubungan masyarakat yang baik dan berupaya menyebarkan atau mempublikasikan kegiatan kerja kepada masyarakat. Data dan informasi yang disampaikan oleh Humas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut antara lain struktur organisasi, Kantor Perwakilan, Kasus Aktual, Siaran Pers, Produk Hukum BPK, Pengumuman, hasilreview, berita-berita kegiatan yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, serta capaian yang diperoleh dari berbagai kegiatan yang telah diikuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu dan lain sebagainya.

Pegawai bagian Hubungan Masyarakat (Humas) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yakni mengelola perpustakaan,

kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan kepala perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu serta fasilitator komunikasi kepada publik melalui media website.

Selain itu, pegawai bagian Humas di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga menjalankan berbagai macam fungsi kehumasan, yakni salah satunya sebagai fasilitator komunikasi kepada publik melalui media website yang menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dan menjadi penerjemah informasi dari pemerintah ke masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa pekerjaan pegawai bagian Humas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu sangat penting agar terbina dan terjaga hubungan baik dengan publik internal dan eksternal. Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu perlu menjaga hubungan baik dengan publik internal, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik eksternal agar tujuan dan tugas suatu instansi pemerintahan bisa tercapai serta terlaksana dengan baik khususnya di lingkungan daerah Provinsi Bengkulu.

## **LANDASAN TEORI**

Dalam pasal 3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pengelolaan kinerja pegawai berorientasi pada: (1) Pengembangan kinerja pegawai, (2) Pemenuhan ekspektasi pimpinan, (3) Dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai, (4) pencapaian kinerja organisasi, dan (5) Hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.

Selanjutnya pasal 5 pada peraturan menteri di atas mengemukakan bahwa pengelolaan kinerja pegawai terdiri atas: (1) Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi, (2) Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai, (3) Penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, dan (4) Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuat perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli, serta jurnal ilmiah. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti, Peter Mahmud Marzuki (2010). Data dalam penelitian ini dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang sumber data. (Sugiyono 2003 : 11). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Informasi dasar tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden atau pihak terkait atau melalui kuisioner berupa kumpulan pertanyaan tentang Kinerja Pegawai Bagian Humas Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Kinerja Pegawai Bagian Humas Di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu**

Kerja bagian Humas tertuang dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No. 30 tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan dilingkungan pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). Dalam penelitian ini, hasil penelitian mendeskripsikan kinerja (hasil kerja) bagian Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan

Provinsi Bengkulu berdasarkan tugas dan fungsi bagian Humas yang terdiri dari: mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan kepala perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan fasilitator komunikasi kepada publik melalui media website.

### 1. Pengelolaan Perpustakaan

Subbagian Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mempunyai tugas mengelola perpustakaan sesuai kaidah pengelolaan perpustakaan yang berlaku, sehingga perpustakaan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi para pembaca. Humas juga melakukan pengadaan bantuan buku siap layan untuk perpustakaan desa dan perpustakaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, bagi perpustakaan yang belum sesuai ketentuan BPK RI.

Humas BPK juga menciptakan Perpustakaan riset yang baru. Perpustakaan riset baru ini akan mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dengan menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik. Sementara itu perpustakaan BPK juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi BPK untuk membuka akses publik terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagai bahan risetnya.

**Gambar 1 Ruang Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**



Di perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdapat 11 (sebelas) koleksi buku diantaranya:

**Tabel 1. Daftar Koleksi Buku Di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**

JENIS KOLEKSI BUKU	
1. Buku Akuntansi	7. Buku Perpajakan
2. Buku Audit	8. Buku Sosial dan Sejarah
3. Buku Ekonomi/Manajemen	9. Buku Psikologi
4. Buku Kisah dan Fiksi	10. Buku Teknik
5. Buku Hukum	11. Buku Agama
6. Buku Komputer	

Dalam waktu satu bulan biasanya terdapat penambahan koleksi buku sesuai dengan kebutuhan di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Penambahan koleksi buku yang paling banyak yaitu buku kisah dan fiksi yang sering dibaca oleh para tamu yang datang ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

## **2. Kesekretariatan**

Dalam bidang kesekretariatan, tugas Subbagian Humas adalah menyusun jadwal kegiatan Kalan, sehingga seluruh kegiatan Kalan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada kegiatan yang tumpang tindih. Menyiapkan sarana prasarana keperluan rapat atau acara lain (seperti jamuan, daftar hadir, materi rapat, LCD, ruangan, dan lain-lain) yang diikuti oleh Kalan dan/atau di lingkungan internal kantor perwakilan sesuai dengan penugasan, memberikan layanan selama acara berlangsung, agar acara dapat berjalan lancar dan dokumentasi acara lengkap. Selain itu, Subbagian Humas bertugas mengadministrasikan dan memproses dokumen (seperti berupa surat, nota dinas Kalan, Keputusan Kalan, Surat Keterangan, Instruksi Dinas, Surat Tugas nonpemeriksaan, SPJ Kasetlan, dan lain-lain) yang diterima atau dikeluarkan dari kantor perwakilan, supaya tertib administrasi dan dokumen diterima tepat waktu. Mengumpulkan dan mengkompilasi Laporan Tengah Bulanan dari tiap Eselon III di kantor perwakilan berdasarkan standar, sistem dan prosedur yang berlaku, untuk direview oleh Kepala Subbagian Sekretariat Kalan dan disetujui oleh Kalan sebagai bahan untuk membuat Laporan Bulanan Kantor Perwakilan.

## **3. Keprotokolan**

Di bidang keprotokolan, Subbagian Humas bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan aktivitas protokoler baik di dalam lingkungan maupun di luar kantor perwakilan sesuai ketentuan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Humas juga menjelaskan definisi susunan suatu kegiatan, menguraikan bentuk/macam susunan kegiatan, mengidentifikasi tata cara pembuatan susunan kegiatan, mengemukakan pembuatan susunan kegiatan menggunakan aplikasi komputer, melakukan identifikasi pembuatan susunan kegiatan, menyiapkan kelengkapan data dan informasi pembuatan susunan kegiatan dengan lengkap, membuat susunan acara kegiatan dengan tepat sesuai dengan kaidah dan tuntutan kerja. Kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kantor seperti BPK On Class. Diawal tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menerima kunjungan 72 siswa siswi SMKN 1 Kota Bengkulu kelas 10 jurusan akuntansi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu. Hadir pula kepala sekolah Ibu Dr. Hj. Evriza, M.Pd. beserta para guru, dan wali kelas. Acara ini dilakukan guna mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia kerja yang nantinya akan terhubung dengan sendirinya. Acara ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan nara sumber yaitu Plh. Kepala Perwakilan, Kepala Subauditorat Bengkulu I Bapak Ranni Agriadi dan moderator Medy Oktrian dari Subbagian Humas & Tata Usaha Kepala Perwakilan.

## **4. Menyiapkan Informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan**

Sebagai ujung tombak sebuah organisasi, perusahaan, maupun instansi yang sangat berperan melakukan komunikasi dua arah, subbagian Humas juga bertugas menyiapkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di BPK RI yang diperlukan oleh Kepala Perwakilan BPK. Sehingga lebih terarah dan mengetahui informasi terbaru mengenai ke BPK-an.

## **5. Pemutakhiran Data pada Aplikasi SIMAK dalam Rangka Pengukuran IKU Unit Kerja**

Humas BPK RI telah mengembangkan suatu Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI yang telah mulai diimplementasikan pada tahun 2008. SIMAK BPK RI merupakan suatu aplikasi internet berbasis web yang bertujuan untuk mewujudkan BPK RI menjadi suatu organisasi yang fokus terhadap strategi (strategic focused organization).

**Gambar 2 Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK Internet Berbasis Web**

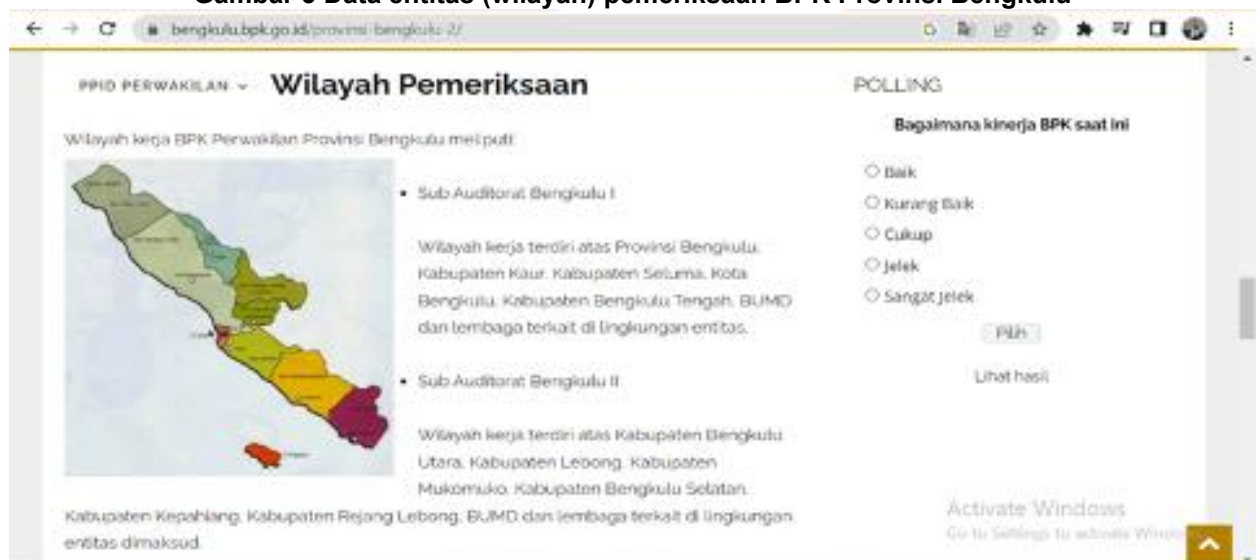


SIMAK BPK RI berfungsi sebagai instrumen untuk memonitor, mengukur, menilai kinerja seluruh satuan kerja (Eselon I dan II) di lingkungan BPK RI dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. Implementasi SIMAK BPK RI diharapkan dapat mewujudkan perubahan di lingkungan BPK RI melalui: "New BPK:LeadingbyExample". Humas BPK RI juga melakukan pembaharuan data secara berkala pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data dalam rangka pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja.

#### **6. Penyimpanan DEP pada Lingkup Tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**

Humas melakukan penyimpanan terhadap Data Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Data Entitas Pemeriksaan (DEP) adalah kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dozir Induk Wilayah (DIW).

**Gambar 3 Data entitas (wilayah) pemeriksaan BPK Provinsi Bengkulu**



Pembagian wilayah entitas di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, Subauditorat Bengkulu I pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas ini. Kedua, Subauditorat Bengkulu II pada lingkup pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas ini.

## 7.Fasilitator Komunikasi Kepada Publik Melalui Media Website

Fasilitator Komunikasi menjadi peran yang cukup penting dilakukan oleh Humas, karena Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan.

**Gambar 4 Situs Website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu**



Humas Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu berusaha untuk mengembangkan komunikasi yang efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mewujudkan tujuan dari Lembaga tersebut. Media Public Relations yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui Website yang dapat diakses 24 jam oleh publik. Humas menjadi jalur komunikasi pemerintah, termasuk juga mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi publik tentang informasi yang dibutuhkan melalui layanan publik, salah satunya adalah media website, serta penyampaian sikap dan pendapat publik terhadap lembaga.

**Gambar 5 Tampilan website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu**



Tampilan Website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu yang baru tampil dengan layanan yang lebih mudah dan lebih lengkap untuk diakses oleh publik, tentu berbeda dengan website yang dahulu. Website edisi baru ini menyajikan berbagai data dan informasi yang lebih mudah diakses oleh berbagai pihak dan pengguna. Komentar, kritik, saran maupun pengaduan dimungkinkan oleh fitur yang ada dalam website ini. Kemudian website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu di kelola oleh orang Humas. Sebagai bentuk informasi, peran Fasilitator Komunikasi berfungsi sebagai tempat komunikasi antara humas dan juga masyarakat.

Kegiatan kehumasan jadi lebih fleksibel, lebih efektif bahkan lebih efisien dibandingkan jika dilakukan di dunia nyata. Dulu untuk suatu program kehumasan konvensional bisa mengeluarkan budget ratusan juta, maka jika program tersebut dilakukan di dunia internet akan jauh lebih murah.

Website dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan informasi terupdate dari Humas. Karena, penggunaan website yang praktis, penggunaan website bisa dilakukan kapan dan dimana saja selama terkoneksi dengan internet. Website merupakan salah satu media yang memberikan kebutuhan kepada publik, memberikan informasi-informasi khususnya website BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dapat diakses 24 jam, tetapi pelayanan yang dilakukan melalui website BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu hanya pada saat jam kerja, yaitu pukul 09.00- 17.00.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah peneliti jelaskan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Bagian Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu:

#### 1. Pengelolaan Perpustakaan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mengelola perpustakaan sesuai kaidah pengelolaan perpustakaan yang berlaku, sehingga perpustakaan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi para pembaca.

#### 2. Kesekretariatan

Dalam bidang kesekretariatan Bagian Humas menyiapkan beberapa perlengkapan seperti komputer dan lainnya guna mengadministrasikan surat-surat yang masuk dan keluar di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

#### 3. Keprotokolan

Bagian Humas telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan aktivitas protokoler baik di dalam lingkungan maupun di luar kantor perwakilan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, salah satu kegiatannya yaitu BPK On Class SMKN 1 Kota Bengkulu.

#### 4. Menyiapkan Informasi yang dibutuhkan Kepala Perwakilan

Humas telah menyiapkan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dibutuhkan Kepala Perwakilan sesuai dengan standar operasional prosedur.

#### 5. Pemutakhiran Data pada Aplikasi SIMAK dalam Rangka Pengukuran IKU Unit Kerja

SIMAK BPK RI merupakan suatu aplikasi internet berbasis web. Dalam hal ini, Humas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan penugasan sesuai dengan standar operasional prosedur kerja.

#### 6. Penyimpanan DEP pada Lingkup Tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Data Entitas Pemeriksaan (DEP) adalah kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dozir Induk Wilayah (DIW).

#### 7. Fasilitator Komunikasi Kepada Publik Melalui Media Website

Dengan adanya website yang menunjang komunikasi kepada masyarakat maka kegiatan kehumasan jadi lebih fleksibel, lebih efektif bahkan lebih efisien jika dibandingkan dilakukan di dunia nyata.

### Saran

1. BPK RI Perwakilan Bengkulu hendaknya mengupgrade atau mengganti fasilitas perlengkapan kantor dengan mode terbaru, agar menunjang kinerja bagian Humas dapat lebih efektif.
2. Tampilan website BPK RI Perwakilan Bengkulu hendaknya menggunakan tampilan yang lebih menarik agar pengunjung website tidak cepat bosan pada saat mengakses website tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Ilham, Saputra HE. Dan A. Imanda. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di PT. Jasaraharja Putera Cabang Bengkulu. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Adminisrasi Publik*. Vol. 6 No. 1 Tahun 2019.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arisanti, Arisa, A. Imanda dan Saputra HE. Analisis Kualitas Kerja Pegawai Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bengkulu Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Adminisrasi Publik*. Vol. 7 No. 1 (2020).
- Darso. (2016). Pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen. (Internet). (di kutip tanggal 28 Nopember Oktober 2021). [irepository.ut.ac.id/6844/1/42518.pdf](http://irepository.ut.ac.id/6844/1/42518.pdf).
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Edy Sutrisno. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Hartini, Yuliana, Lorita, Evi & Amin, Bando C. Kader. 2021. Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018. *Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*. Vol. 8 No. 2 (2021).
- Hidayati, Titis. Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). Diss. Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. *Public Relation Writing*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Lubis, Evawani Elysa. "Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah." *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 12.1 (2012).
- Mangkunegara, Anwar, Prabu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Palan, R. 2007. *Competency Management*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) No. 30 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Dilingkungan Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomr 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Pratama, SA., Lorita, Saputra HE. Dan Ningsih MS. Human Resource Management Planning at PT. Batang Hari Benulu Primary. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 2 No. 1 (2022).
- Ruslan, Rosadi. 2006. *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sinambela, Poltak, Lijan. 2019. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Siswanto, Belinda Devi Larasati, and Firda Zulivia Abraham. "Peran humas pemerintah sebagai fasilitator komunikasi pada biro humas Pemprov Kalimantan Selatan." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 19.1 (2016).
- Sudarmanto. 2019. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sudiman. 1998. *Bahan Diklat Prajabatan Golongan III: Kepegawaian*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara–Republik Indonesia.
- Sulistiyani, A., dkk., 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Website :
- <https://bengkulu.bpk.go.id/dasar-hukum-bpk-ri/>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132857/permen-pan-rb-no-9-tahun-2011>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132871/permen-pan-rb-no-30-tahun-2011>